



Sekretariat Jenderal
DPR RI



LAPORAN KINERJA BIRO ORGANISASI DAN PERENCANAAN

▶▶▶▶▶ **2022**





SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BIRO ORGANISASI DAN PERENCANAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Organisasi dan Perencanaan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 8 Februari 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
INSPEKTUR II

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan Tahun 2022 ini merupakan perwujudan atas pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka *good governance* dan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis serta penggunaan sumber daya yang ada dan pelaksanaan kebijakan yang diamanatkan kepada Biro Organisasi dan Perencanaan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan Tahun 2022 bertujuan untuk menyajikan keberhasilan pencapaian sasaran maupun tujuan Biro Organisasi dan Perencanaan sebagai jabaran dari visi, misi, dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Semoga penyajian laporan kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome* di masa mendatang, dan selanjutnya diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Biro

Organisasi dan Perencanaan dan Sekretariat Jenderal DPR RI di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

Kepada seluruh jajaran Biro Organisasi dan Perencanaan yang telah membantu dalam penyusunan laporan kinerja ini, baik tenaga maupun pikirannya kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat secara optimal.

Jakarta, 10 Januari 2023

**Kepala Biro Organisasi dan Perencanaan
Sekretariat Jenderal DPR RI**



Dr. Aulia Sofyan, S.Sos., M.Si.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	viii
<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>	ix
TIM PENYUSUN	xi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	11
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	21
BAB 4. PENUTUP	59
LAMPIRAN.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sasaran Program dan IKU Deputi Bidang Administrasi	14
Tabel 2.2	Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Deputi Bidang Administrasi	15
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan Tahun 2022	16
Tabel 3.1	Capaian Target Kinerja Tahun 2022	23
Tabel 3.2	Realisasi Nilai Perencanaan Kinerja Tahun 2022 Indikator 1	24
Tabel 3.3	Persandingan Nilai Realisasi Kinerja Indikator 1	24
Tabel 3.4	Persandingan Nilai Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Indikator 1	24
Tabel 3.5	Realisasi Nilai Perencanaan Kinerja Tahun 2022 Indikator 2	32
Tabel 3.6	Persandingan Nilai Realisasi Kinerja Indikator 2	32
Tabel 3.7	Persandingan Nilai Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Indikator 2	32
Tabel 3.8	Realisasi Nilai Perencanaan Kinerja Tahun 2022 Indikator 3	37
Tabel 3.9	Persandingan Nilai Realisasi Kinerja Indikator 3	37
Tabel 3.10	Persandingan Nilai Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Indikator 3	37
Tabel 3.11	Realisasi Nilai Perencanaan Kinerja Tahun 2022 Indikator 4	46
Tabel 3.12	Persandingan Nilai Realisasi Anggaran per Bagian Indikator 4	46

Tabel 3.13	Persandingan Nilai Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Indikator 4	46
Tabel 3.14	Realisasi Nilai Perencanaan Kinerja Tahun 2022 Indikator 5	48
Tabel 3.15	Persandingan Nilai Realisasi Kinerja Indikator 5	48
Tabel 3.16	Persandingan Nilai Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Indikator 5	48
Tabel 3.17	Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	50
Tabel 3.18	Realisasi Nilai Perencanaan Kinerja Tahun 2022 Indikator 6	51
Tabel 3.19	Persandingan Nilai Realisasi Kinerja Indikator 6	51
Tabel 3.20	Persandingan Nilai Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Indikator 6	51
Tabel 3.21	Sasaran, Indikator Pagu dan Realisasi Biro Organisasi dan Perencanaan Tahun 2022	58
Tabel 4.1	Capaian Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan Tahun 2022	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Biro Organisasi dan Perencanaan	4
Gambar 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan	7
Gambar 2.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	13
Gambar 2.2	Persandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Biro Organisasi dan Perencanaan	17
Gambar 2.3	Penandatanganan Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan Tahun 2022	17
Gambar 2.4	<i>Cascading</i> Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan dan Deputi Bidang Administrasi Tahun 2022	18
Gambar 3.1	<i>Screenshot</i> e-PPKP	26
Gambar 3.2	<i>Screenshot</i> Aplikasi KRISNA	27
Gambar 3.3	Pembagian DIPA dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja di Ruang Rapat Banggar	28
Gambar 3.4	DIPA petikan dan Daftar Alokasi Anggaran (AA)	29
Gambar 3.5	Daftar TOR di Aplikasi SINCAN dan <i>Cloud</i> DPR	30
Gambar 3.6	Upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan	31
Gambar 3.7	<i>Screenshot</i> Aplikasi E-MIKIR ASIK	35
Gambar 3.8	<i>Screenshot</i> Aplikasi Si-Caput	36
Gambar 3.9	Penilaian Komponen AKIP berdasarkan PerMenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	40

Gambar 3.10	Tindak Lanjut Rekomendasi KemenPAN-RB dan Inspektorat Utama	41
Gambar 3.11	Laporan Evaluasi Indikator dan Target Kinerja	43
Gambar 3.12	Persandingan Target Kinerja Tahun 2022 dengan Laporan Kinerja Tahun 2021	43
Gambar 3.13	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	44
Gambar 3.14	Sosialisasi Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022	45
Gambar 3.15	Upaya meningkatkan pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	50
Gambar 3.16	Buku Terbitan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2022	55
Gambar 3.17	Realisasi Anggaran per Unit Kerja di Biro Organisasi dan Perencanaan	56
Gambar 3.18	Realisasi Anggaran Biro Organisasi dan Perencanaan Tahun 2022	57

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Rata-Rata Nilai SAKIP Tahun 2016-2021	22
Grafik 3.2	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Tahun 2009-2021	26
Grafik 3.3	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Tahun 2009-2021	34
Grafik 3.4	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Tahun 2009-2021	39

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan Tahun 2022 merupakan gambaran kinerja dari seluruh unit kerja di lingkungan Biro Organisasi dan Perencanaan termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2022. Dalam Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan 2022 ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran kegiatan dan 6 (enam) indikator kinerja.

Selama tahun 2022, Biro Organisasi dan Perencanaan telah berhasil melakukan penguatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, menyiapkan rencana strategis dan rencana program kerja tahunan Sekretariat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI), melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik dan bersih di lingkungan Setjen DPR RI, serta meningkatkan realisasi anggaran tahun 2022. Secara umum capaian sasaran kegiatan tersebut telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat baik dengan capaian setiap indikator kinerja mencapai 100% sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Capaian Target Kinerja Tahun 2022

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR RI	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	21,50	20,45*	95,12%
	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	16,00	15,68*	98%
	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	10,50	9,95*	94,76%
	Persentase Realisasi Anggaran Biro Organisasi dan Perencanaan	95%	99%	104%

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI	Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	7,62	7,54*	98,95%
	Nilai Kinerja Organisasi	7,50	7,41*	98,8%

Keterangan : * Data realisasi merupakan data capaian Tahun 2021

Lima (5) indikator yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan merupakan hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan belum keluarnya hasil penilaian SAKIP Setjen DPR RI untuk tahun 2022, sehingga data realisasi yang digunakan adalah data hasil penilaian tahun 2021. Sementara target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2022 sudah didasarkan pada hasil yang telah diperoleh pada tahun sebelumnya yakni tahun 2021. Akibatnya tidak terlihat adanya kenaikan pada capaian kinerja di Biro Organisasi dan Perencanaan kecuali untuk indikator persentase realisasi anggaran Biro Organisasi dan Perencanaan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Organisasi dan Perencanaan mengelola pagu anggaran sebesar Rp10.591.138.000. Pada tahun 2022, Biro Organisasi dan Perencanaan merealisasikan anggaran sebagai pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan di lingkungan Biro Organisasi dan Perencanaan sebesar Rp10.582.177.435,- atau sebesar 99,92%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian Biro Organisasi dan Perencanaan ke depannya. Hasil evaluasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Biro Organisasi dan Perencanaan dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

TIM PENYUSUN

Pengarah

Dr. Aulia Sofyan, S.Sos., M.Si.

Penanggungjawab

Siti Atika, S.E.

Koko Surya Dharma, A.K.S., M.Si.

Afniwaty Tanjung, S.E., M.E.

Ketua

Ni'mah Wahyu Purnami, S.E.

Wakil Ketua

Niyanti Anggitasari, S.E.

Sekretaris

Suciati, S.Sos

Anggota

Ratna Puspita Sari, S.E., M.Ak

Pradanadi Saksesa Drinanda Ibrahim, S.Kom.M.Ak

Saeful Anwar, S.IP., M.E

Anggara Akbar Hasibuan, S.E.

Dwita Amelia Fitriani, S.E.

Rozanna Indrawardani, S.E.

Irma Yulistiani, S.E.

Yusuf Indra Wijaya, S.E.

Ajib Dwi Suprayoga, S.Tr.M.

Ayu Hapsari, A.Md.Bns.

Rasyida Husnaini A.Md.

Nurul Hidayah, A. Md.

Santy Yulfiani Girsang, S.E.

Dem Irfan Muhammad Ginting, S.IP.

Dimas Reza Prakasita, S.M.

Mulyana, S.Sos

Annissa Putri Nasyi'ah, S.E.

Nur Rochman

Wahyu Hery Prayitno, S.Kom.

Anggota

Intan Nurul Aflah
Nauval Musaddiq

Tim *Layout*

Roffi Anugrah
Zuhaida Jasmine Zahari



Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2022 dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu organisasi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) organisasi, dalam rangka perwujudan *good governance* di lingkungan pemerintahan. Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, LKj juga sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa datang.

Berdasarkan Persekjen Nomor 6 Tahun 2021, Biro Organisasi dan Perencanaan bertanggung jawab menyelenggarakan penataan organisasi dan jabatan, penataan tata laksana, perencanaan program dan anggaran, serta pengelolaan kinerja organisasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sebagai unit kerja pendukung kinerja Setjen DPR RI, maka Biro Organisasi dan Perencanaan berkewajiban memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan dalam mencapai sasaran strategisnya serta mempertanggungjawabkan seluruh proses dan hasil kerja yang telah dilaksanakan. Untuk itu, Biro Organisasi dan Perencanaan menyusun LKj Tahun 2022 sebagai media pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyusunan LKj Biro Organisasi dan Perencanaan Tahun 2022 diharapkan secara umum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi dan secara internal dapat mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi secara baik dan akuntabel, efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi dari pengguna layanan.

Biro Organisasi dan Perencanaan mempunyai komitmen yang kuat untuk melakukan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome*, di sisi lain penyusunan LKj ini juga dimaksudkan sebagai penerapan prinsip akuntabilitas yang merupakan pilar penting menjadi *good governance* dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun.

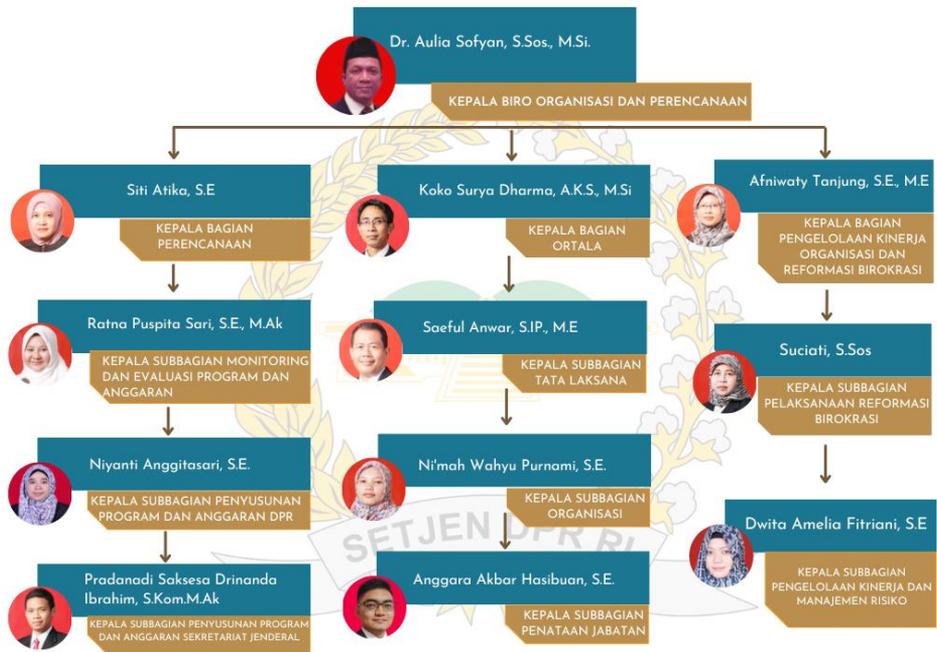
1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Persekjen Nomor 6 Tahun 2021, Biro Organisasi dan Perencanaan memiliki tugas menyelenggarakan penataan organisasi dan jabatan, penataan tata laksana, perencanaan program dan anggaran, serta pengelolaan kinerja organisasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Biro Organisasi dan Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan dan evaluasi rencana, program dan anggaran di lingkungan Biro Organisasi dan Perencanaan;
- b) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang organisasi dan perencanaan;
- c) pelaksanaan penataan organisasi dan jabatan;
- d) pelaksanaan penataan tata laksana;
- e) pelaksanaan perencanaan program dan anggaran;
- f) pelaksanaan pengelolaan kinerja organisasi dan reformasi birokrasi;
- g) penyusunan laporan kinerja organisasi dan perencanaan; dan
- h) pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Administrasi.

Berdasarkan Persekjen Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 220, Biro Organisasi dan Perencanaan terdiri atas 3 (tiga) Bagian yaitu Bagian Perencanaan, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, dan Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Adapun Struktur Organisasi Biro Organisasi dan Perencanaan secara keseluruhan tertuang dalam gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Biro Organisasi dan Perencanaan

a. Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan monitoring serta evaluasi program dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Setjen DPR RI. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Perencanaan;
- Penyusunan bahan kegiatan di bidang perencanaan;
- Pelaksanaan penyiapan bahan rencana program, kegiatan dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Pelaksanaan penyiapan bahan rencana program, kegiatan dan anggaran sekretariat jenderal;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan sekretariat jenderal;
- Pelaksanaan tata usaha Bagian Perencanaan; dan

- Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Organisasi dan Perencanaan.

b. Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi, jabatan dan tata laksana di lingkungan Setjen DPR RI. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- Penyusunan bahan kegiatan di bidang penataan organisasi, jabatan dan tata laksana;
- Pelaksanaan penelaahan dan evaluasi kelembagaan di lingkungan sekretariat jenderal;
- Pelaksanaan penataan jabatan di lingkungan sekretariat jenderal;
- Penataan proses bisnis di lingkungan sekretariat jenderal;
- Pelaksanaan penyusunan standarisasi dan evaluasi prosedur, norma, dan standar kerja di lingkungan sekretariat jenderal;
- Pelaksanaan tata usaha Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
- Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Organisasi dan Perencanaan

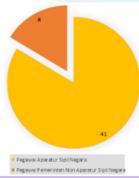
c. Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kinerja organisasi, manajemen resiko dan reformasi birokrasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
- Penyusunan bahan kegiatan di bidang Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
- Penyiapan bahan rencana strategis dan rencana program kerja tahunan sekretariat jenderal;

- Penyiapan bahan rencana strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Pengelolaan kinerja organisasi;
- Pengelolaan resiko organisasi;
- Pengelolaan reformasi birokrasi;
- Pelaksanaan tata usaha Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi; dan
- Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Organisasi dan Perencanaan

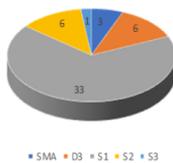
Sumber Daya Manusia (SDM) Biro Organisasi dan Perencanaan memiliki kompetensi yang mampu mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta mewujudkan lingkungan kerja yang *good and clean government* sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, guna menghasilkan penyusunan rencana program dan anggaran, penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Setjen DPR RI dan terlaksananya pengelolaan kinerja organisasi, manajemen resiko dan reformasi birokrasi yang berkualitas perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal.



Berdasarkan status kepegawaian dari 49 orang pegawai, 41 orang pegawai dengan status ASN dan 8 orang pegawai dengan status Non ASN



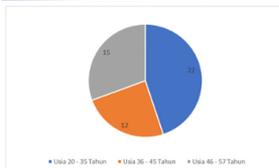
Berdasarkan jenis kelamin, komposisi pegawai terdiri dari 27 orang berjenis kelamin laki-laki dan 22 orang berjenis kelamin wanita



Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai terdiri dari 1 pegawai berpendidikan S3, 6 pegawai berpendidikan S2, 33 pegawai berpendidikan S1, 6 orang berpendidikan D3, dan 3 orang berpendidikan SLTA



Komposisi jumlah di masing-masing bagian berdasarkan status kepegawaian



Berdasarkan rentang usia, usia 20 - 35 Tahun terdiri dari 22 orang, 36 - 45 Tahun terdiri dari 12 orang, dan 46 - 57 terdiri dari 15 orang

JABATAN TINGGI PRATAMA	KEPALA BIRO ORGANISASI DAN PERENCANAAN
JABATAN ADMINISTRATOR	<ul style="list-style-type: none"> KEPALA BAGIAN ORTALA KEPALA BAGIAN PERENCANAAN KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA
<ul style="list-style-type: none"> KEPALA SUBBAGIAN TATA LAKSANA KEPALA SUBBAGIAN ORGANISASI KEPALA SUBBAGIAN PENATAAN JABATAN KEPALA SUBBAGIAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN ANGGARAN KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN DPR KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN SEKRETARIAT JENDERAL KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN KINERJA DAN MANAJEMEN RISIKO 	<ol style="list-style-type: none"> ANALIS TATA LAKSANA → 2 Orang ANALIS ORGANISASI → 2 Orang ANALIS JABATAN → 2 Orang ANALIS PERENCANAAN → 3 Orang ANALIS PELAKSANAAN ANGGARAN → 3 Orang PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN → 3 Orang ANALIS KINERJA → 3 Orang ANALIS MANAJEMEN RISIKO → 1 Orang ANALIS PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN → 1 Orang PENGELOLA DATA → 3 Orang PENGELOLA AKUNTABILITAS KEUANGAN → 1 Orang PENGADMINISTRASI UMUM → 2 Orang

Komposisi pegawai berdasarkan jenis jabatan

Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Biro Organisasi dan Perencanaan

1.3 ISU STRATEGIS

Biro Organisasi dan Perencanaan memiliki peran yang sangat strategis di lingkungan Setjen DPR RI dalam memberikan dukungan terkait Perencanaan, Organisasi dan Ketatalaksanaan, dan Pengelolaan Kinerja Organisasi serta Reformasi Birokrasi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Organisasi dan Perencanaan setidaknya memiliki 2 (dua) isu strategis yang mempengaruhi capaian target kinerja, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan jumlah beban kerja yang ada, Biro Organisasi dan Perencanaan memiliki kebutuhan pegawai sebanyak 61 orang. Sedangkan jumlah pegawai saat ini berjumlah 49 orang, sehingga masih terdapat kekurangan SDM sebanyak 12 orang. Selain itu, ketersediaan SDM yang ada saat ini masih didominasi dengan Pejabat Pelaksana yang belum memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan bidang pekerjaannya.

b. Mekanisme Kerja

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, masih terdapat mekanisme kerja yang belum diperbaharui atau diturunkan menjadi prosedur kerja yang lebih rinci. Mekanisme kerja tersebut berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan revisi anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, pelaksanaan reformasi birokrasi, penataan organisasi dan ketatalaksanaan.

1.4 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan Tahun 2022 disusun berdasarkan sistematika yang ditetapkan dalam Persekjen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagai berikut:

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
EXECUTIVE SUMMARY

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

1.3 Isu Strategis

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2020-2024

2.2. Perjanjian Kinerja

2.3. Metode Penghitungan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.2. Rekomendasi



2 0 2 2

BAB II



PERENCANAAN KINERJA

LKJ
BIBRO
OREN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pemberian dukungan terhadap fungsi-fungsi dewan, program kerja Biro Organisasi dan Perencanaan mengacu pada Rencana Strategis Deputi Bidang Administrasi Tahun 2020 – 2024 sebagai dasar dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan biro dalam mencapai visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai.

VISI

Visi Sekretariat Jenderal DPR RI

“Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia”

Visi Deputy Bidang Administrasi

“Menjadi Deputy Bidang Administrasi yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”

MISI

Misi Sekretariat Jenderal DPR RI

- 1 Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 2 Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 3 Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahandalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

TUJUAN

Tujuan Deputy Bidang Administrasi

- 1 Terwujudnya dukungan administrasi yang prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 2 Terwujudnya tata kelola administrasi yang profesional dan baik

Misi Deputy Bidang Administrasi

- 1 Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 2 Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Deputy Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

SASARAN

Sasaran Deputy Bidang Administrasi

- 1 Terwujudnya Tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas
- 2 Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputy Bidang Administrasi
- 3 Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputy Bidang Administrasi yang berkualitas

Gambar 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Sasaran program adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata dari suatu program. Apa yang akan dicapai oleh Deputi Bidang Administrasi harus selaras dengan sasaran yang akan dituju oleh Setjen DPR RI. Sekjen DPR RI memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja utama (IKU).

Untuk mendukung sasaran strategis Sekjen DPR RI tersebut, maka sasaran program yang akan disusun oleh Deputi Bidang Administrasi harus selaras. Semua program dan kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Administrasi juga masuk ke dalam program dukungan manajemen. Adapun sasaran program beserta indikator kinerja dari Deputi Bidang Administrasi tercantum pada Tabel di bawah.

Tabel 2.1. Sasaran Program dan IKU Deputi Bidang Administrasi

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target			
			2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1.	Indeks Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Inisiasi	Inisiasi	Esensi	Proaktif
	2.	Indeks Pengelolaan Keuangan	91	92	93	94
	3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	7,52	7,65	7,72	7,82
	4.	Nilai Kinerja Organisasi	4,63	4,73	4,83	4,93
Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Administrasi	1.	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Administrasi	3,22	3,24	3,26	3,28
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang	1.	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi	BB	A	A	AA

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target			
			2021	2022	2023	2024
Administrasi yang berkualitas		Bidang Administrasi				
	2.	Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Administrasi	B	B	A	A

Tabel 2.2. Penyeragaman Tujuan dan Sasaran Deputi Bidang Administrasi

Tujuan	Sasaran Program
Terwujudnya dukungan administrasi yang prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Administrasi
Terwujudnya tata kelola administrasi yang profesional dan baik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Biro Organisasi dan Perencanaan telah memiliki dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan Tahun 2022 terdiri atas 2 (dua) Sasaran Program dan 6 (enam) Indikator Kinerja. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022. Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2022. Adapun Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan Tahun 2022 tertuang dalam Tabel 2.3. dibawah ini.

**Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja
Biro Organisasi dan Perencanaan Tahun 2022**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1.	Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR	1.	Nilai komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	21,50
		2.	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	16,00
		3.	Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	10,50
		4.	Persentase realisasi anggaran Biro Organisasi dan Perencanaan	95%
2.	Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan RB Setjen DPR	1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	7,62
		2.	Nilai Kinerja Organisasi	7,50

Pada pertengahan tahun Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan dilakukan evaluasi atas target yang dibuat pada awal tahun pada indikator nilai kinerja organisasi, dimana semula target capaian untuk indikator tersebut adalah sebesar 4,73. Namun terjadi peningkatan nilai kinerja organisasi berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KemenPAN-RB untuk Kinerja Organisasi Tahun 2021 dimana hasil evaluasi ini baru dikeluarkan pada bulan Maret 2022 dengan nilai evaluasi meningkat menjadi 7,41. Sehingga Biro Organisasi dan Perencanaan melakukan penyesuaian target atas indikator ini menjadi 7,50. Persandingan perubahan Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan Tahun 2022 digambarkan sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No. (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR	1. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	21,50
		2. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	16,00
		3. Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	10,50
		4. Persentase realisasi anggaran Biro Organisasi dan Perencanaan	95%
2.	Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan RB Setjen DPR	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	7,65
		2. Nilai Kinerja Organisasi	4,73
Program		Anggaran	
Program Dukungan Manajemen		Rp.8.154.122.000,-	

Pt. Deputi Bidang Administrasi,


Drs. Diaka Dwi Winarko, M.Si
NIP. 19650705 199103 1 003

Jakarta, 21 Desember 2021
Kepala Biro Organisasi dan Perencanaan


Dr. Aulia Sofyan, S.Sos., M.Si
NIP. 19721018 199203 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No. (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR	1. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	21,50
		2. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	16,00
		3. Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	10,50
		4. Persentase realisasi anggaran Biro Organisasi dan Perencanaan	95%
2.	Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan RB Setjen DPR	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	7,62
		2. Nilai Kinerja Organisasi	7,50
Program		Anggaran	
Program Dukungan Manajemen		Rp. 8.154.122.000,-	

Deputi Bidang Administrasi,


Ir. Sumanandono, MPM
NIP. 19650618 198811 1 001

Jakarta, Agustus 2022
Kepala Biro Organisasi dan Perencanaan

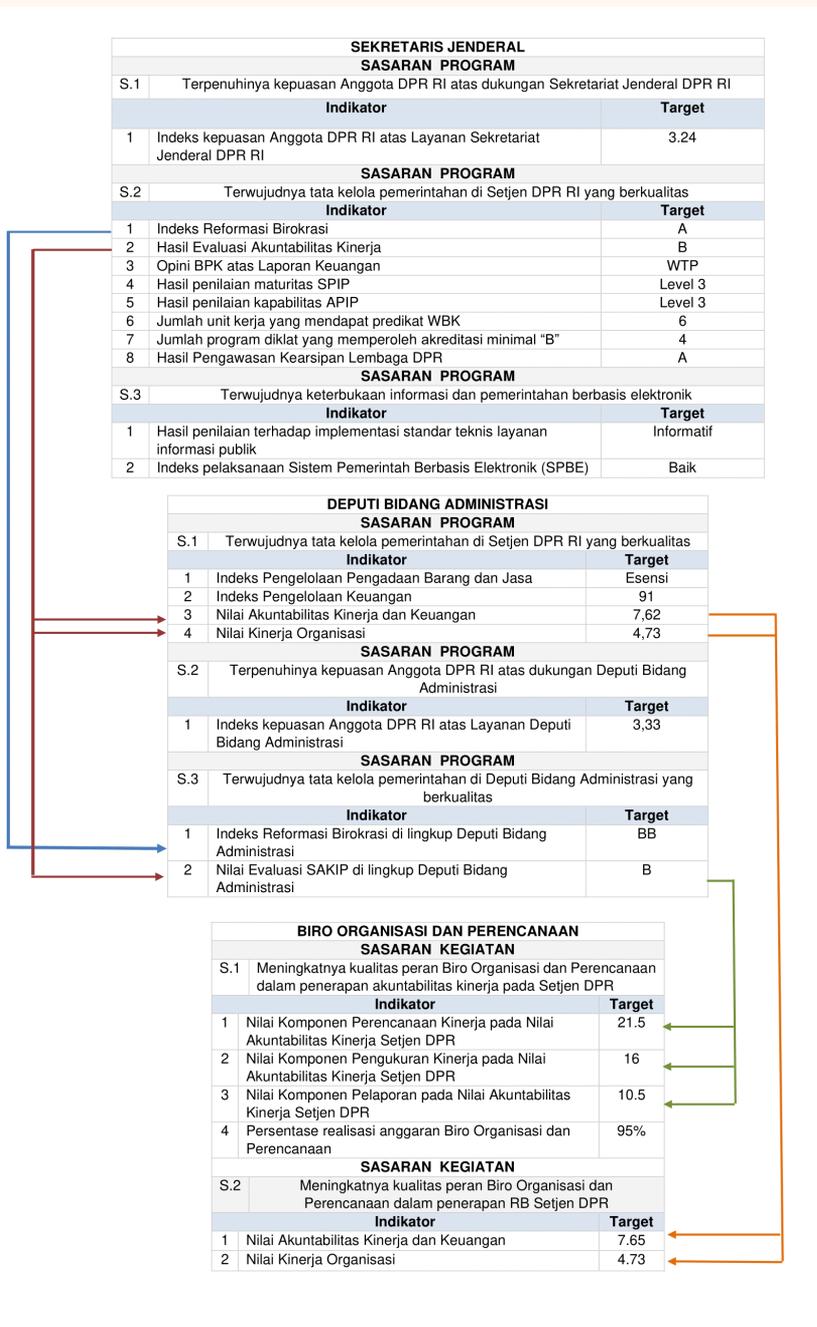

Dr. Aulia Sofyan, S.Sos., M.Si
NIP. 19721018 199203 1 002

Gambar 2.2
Persandingan Perubahan Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan Tahun 2022



Gambar 2.3
Penandatanganan Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan Tahun 2022

Cascading Biro Organisasi dan Perencanaan



Gambar 2.4 Cascading Biro Organisasi dan Perencanaan

2.3 METODE PENGHITUNGAN

1. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR

Penghitungan kinerja “Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR” berdasarkan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh KemenPAN & RB.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

2. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR

Penghitungan kinerja “Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR” berdasarkan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh KemenPAN & RB.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

3. Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR

Penghitungan kinerja “Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR” berdasarkan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh KemenPAN & RB.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan

anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

4. Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Penghitungan kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan” oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN & RB) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024.

Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian pada tahun sebelumnya.

5. Nilai Kinerja Organisasi

Penghitungan kinerja “Nilai Kinerja Organisasi” oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN & RB) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024. Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian pada tahun sebelumnya.

2 0 2 2

BAB III



AKUNTABILITAS KINERJA

IKKUBIROBEN

BAB III

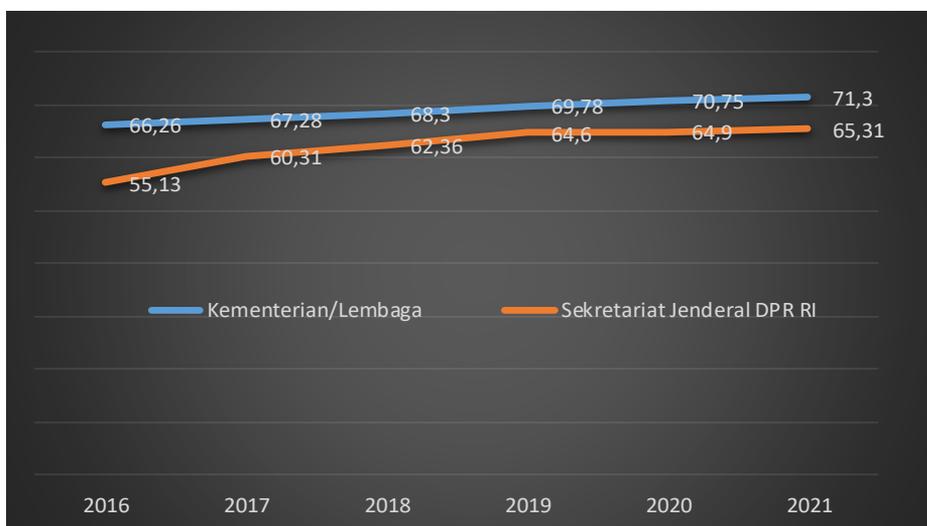
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja organisasi diperlukan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan agar lebih baik dari tahun ke tahun. Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan target kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja yang memuat sasaran program/kegiatan, indikator kinerja dengan target hasil capaian selama satu tahun.

Perbandingan nilai SAKIP Setjen DPR RI dengan rata-rata nilai SAKIP nasional, tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

Grafik 3.1 Rata-Rata Nilai SAKIP Tahun 2016-2021



Sumber: Kementerian PANRB

Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan tahun 2022 mempunyai 2 (dua) sasaran kegiatan dan 6 (enam) indikator kinerja. Adapun rincian capaian kinerja Biro Organisasi dan

Perencanaan dari masing-masing sasaran strategis terdapat pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 1. Capaian Target Kinerja Tahun 2022

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR RI	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	21,50	20,45*	95,12%
	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	16,00	15,68*	98%
	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	10,50	9,95*	94,76%
	Persentase realisasi anggaran Biro Organisasi dan Perencanaan	95%	99%	104%
Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan RB Setjen DPR RI	Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	7,62	7,54*	98,56%
	Nilai Kinerja Organisasi	7,50	7,41*	98,8%

Keterangan : * Data realisasi merupakan data capaian Tahun 2021

Keenam indikator kinerja tersebut mencerminkan tugas dan fungsi Biro Organisasi dan Perencanaan serta unit di bawahnya sebagai upaya menjalankan wewenangnya sebagai penyelenggara penataan organisasi dan jabatan, penataan tata laksana, perencanaan program dan anggaran serta pengelolaan kinerja organisasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mengedepankan prinsip pelayanan yang paripurna kepada DPR RI secara akuntabel. Selanjutnya, dalam menjalankan fungsi koordinasi, Kepala Biro Organisasi dan Perencanaan mendistribusikan pelaksanaan indikator kinerja kepada seluruh bagian di lingkungan Biro Organisasi dan Perencanaan.

Indikator Kinerja 1

Tabel 3.2 Realisasi Nilai Perencanaan Kinerja Tahun 2022 Indikator 1

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
01 Meningkatkan kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR RI	Nilai Komponen pada Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR RI	21,50	20,45	95,12%

Tabel 3.3 Persandingan Nilai Realisasi Kinerja Indikator 1

02	Indikator Kinerja	Nilai Komponen pada Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR RI								
		2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
			20,41	20,45	100,19%	21,50	20,45	95,12%		

Tabel 3.4 Persandingan Nilai Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Indikator 1

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target (RPJM) 2024	Tingkat Kemajuan
03 Meningkatkan kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR RI	Nilai Komponen pada Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR RI	20,45	20,45	22,50	90,89%



Perhitungan indikator Nilai Komponen Perencanaan Kinerja, merupakan salah satu komponen penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilakukan oleh KemenPAN-RB, Komponen perencanaan kinerja mempunyai bobot nilai paling tinggi untuk penilaian AKIP dengan nilai 30, pada tahun 2022, target yang ditentukan untuk komponen adalah perencanaan kinerja adalah sebesar 21,50. Apabila penilaian oleh KemenPAN-RB tidak diperoleh hingga penyusunan Laporan Kinerja, maka realisasi dan pencapaiannya diperoleh dari hasil penilaian tahun sebelumnya. Realisasi nilai pencapaian pada indikator kinerja 1 dapat dilihat pada Tabel 3.2

Berdasarkan surat KemenPAN-RB Nomor B/32/M.AA.05/2022 tanggal 7 Maret 2022 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021, Nilai Komponen Perencanaan Kinerja sebesar 20,45. Nilai tersebut meningkat dibanding tahun 2020 yang mencapai 20,41. Dengan demikian, capaian kinerja pada indikator nilai akuntabilitas kinerja dan keuangan sebesar 95,12%.

Dengan memperhatikan realisasi Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada tahun 2021 sebesar 20,45, maka pada tahun 2022 Biro Organisasi dan Perencanaan menetapkan target lebih tinggi dibandingkan hasil capaian pada tahun 2021. Hal ini selaras dengan salah satu rekomendasi dari KemenPAN-RB yang menyarankan agar capaian kinerja tahun sebelumnya dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan strategis pada periode berikutnya

Sebagai pembandingan, indikator Nilai Komponen Perencanaan Kinerja selalu mengalami tren naik dari mulai dibentuknya Biro Organisasi dan Perencanaan pada tahun 2021. Persandingan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.3

Pada Tabel 3.4 dapat dilihat perbandingan realisasi Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dengan target jangka menengah tahun 2024 yang diamanatkan dalam Renstra Setjen. Tingkat

kemajuan capaian pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan target jangka menengah sudah mencapai 90.88%.

Dalam Periode 2020-2024, sampai dengan tahun 2021, Nilai Komponen Perencanaan Kinerja yang diperoleh oleh Biro Organisasi dan Perencanaan selalu mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat pada grafik 3.2 berikut:



Grafik 3.2 Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Tahun 2009-2021

Dalam upaya peningkatan capaian Nilai Komponen Perencanaan Kinerja tahun 2022 yang diberikan oleh KemenPAN-RB. Biro Organisasi dan Perencanaan, telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai bentuk dari tindak lanjut yang dilakukan atas rekomendasi KemenPAN-RB pada tahun 2022 yaitu menyusun Rencana Aksi sebagai tahapan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja di unit kerja terkecil, dan menyampaikannya melalui esr.menpan.go.id.

Indikator	Target	Rencana Aksi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Ok	Nov	Des
(1-1) Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI [TAMBAH-RENAKSI]	3,22													
(2-1) Indeks Reformasi Birokrasi [TAMBAH-RENAKSI]	BB													
(2-2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja [TAMBAH-RENAKSI]	B													
(2-3) Opini BPK atas Laporan Keuangan [TAMBAH-RENAKSI]	WTP													
(2-4) Hasil penilaian maturitas SPIP [TAMBAH-RENAKSI]	Level 3													
(2-5) Hasil penilaian kapabilitas APIP [TAMBAH-RENAKSI]	Level 3													

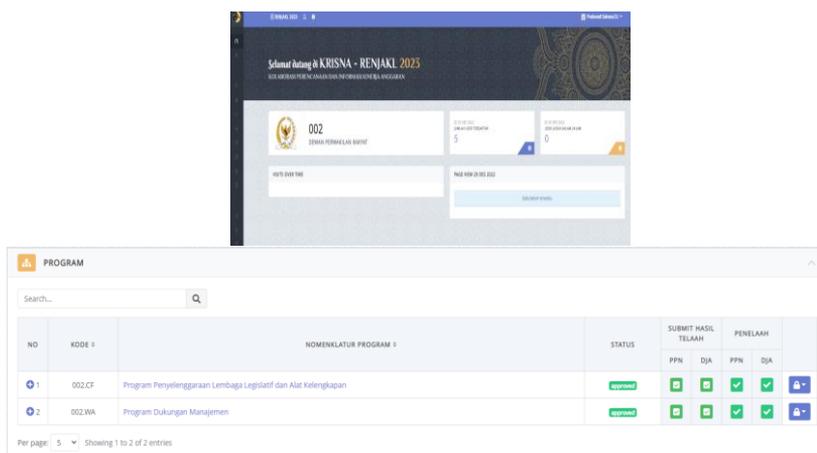
Gambar 3.1
Screenshot e-PPKP

Selain pemenuhan rekomendasi KemenPAN-RB, terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Perencanaan untuk meningkatkan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja, sebagai berikut:

a. Penyusunan Rencana Kerja/Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah

Sebelum melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, setiap Kementerian/ Lembaga diminta untuk mengisi Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) di aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) satu tahun sebelumnya (t-1).

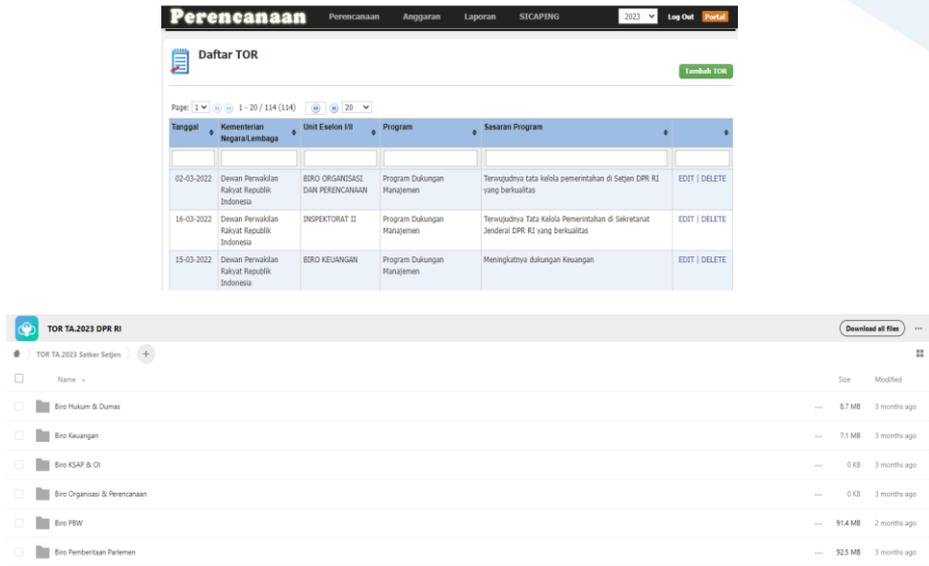
Pengisian Rencana Kerja/Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) Tahun 2023 yang dirumuskan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI melalui Aplikasi KRISNA pada bulan Desember 2021 – November 2022.



Gambar 3.2 Screenshot Aplikasi KRISNA

b. Penyusunan Perjanjian Kinerja

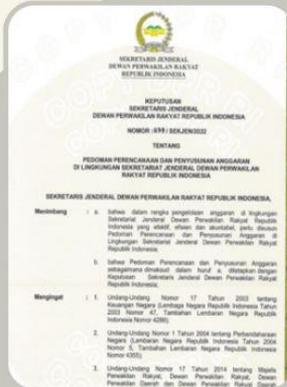
Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah disahkan pada 14 Desember 2022. Sejalan dengan rencana perubahan Struktur Organisasi Setjen DPR RI, maka pada tahun 2023 akan dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 seiring dengan keluarnya Persekjen DPR RI tentang Perubahan SOTK Setjen DPR RI. Perjanjian Kinerja juga telah digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Matriks Perjanjian Hasil (MPH) sebagai sarana untuk penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sampai dengan kinerja level individu.



Gambar 3.5. Daftar TOR di Aplikasi SINCAN dan *Cloud* DPR

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja organisasi, seluruh unit organisasi pada hakekatnya selalu berupaya mencapai kinerja yang menunjukkan tren positif atau meningkat. Terlepas dari hal tersebut, upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan salah satunya adalah penyusunan rencana aksi yang telah dilakukan segenap jajaran di Biro Organisasi dan Perencanaan.

UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA BIRO ORGANISASI DAN PERENCANAAN



PENYUSUNAN PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN SETJEN DPR RI

- Acuan pembelajaran terkait perencanaan dan penyusunan anggaran
- Sarana berbagi informasi terkait penyusunan RKA-K/L
- Menyamakan pemahaman terkait perencanaan dan penyusunan anggaran
- Penyeragaman format perencanaan anggaran tahunan
- Memudahkan koordinasi, implementasi dan pengendalian perencanaan kegiatan, kinerja dan anggaran.

PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA ANGGARAN SETJEN DPR RI TERKAIT PENYUSUNAN RKA TAHUN 2023

- Meningkatkan kualitas penyusunan usulan RKA Tahun 2023;
- Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran tahun berjalan;
- Mengidentifikasi masukan dan saran yang bersifat konstruktif dalam proses penyusunan RKA melalui pendampingan Biro Organisasi dan Perencanaan.



MELAKSANAKAN KUNJUNGAN KERJA

Menyediakan bahan pertimbangan dalam menyusun kajian kemandirian anggaran dan mendapatkan praktek terbaik dalam penguatan reformasi birokrasi yang dilaksanakan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai *supporting system* lembaga legislatif

Gambar 3.6 Upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan

Indikator Kinerja 2



Tabel 3.5 Realisasi Nilai Perencanaan Kinerja Tahun 2022 Indikator 2

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
01 Meningkatkan kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR RI	Nilai Pengukuran Kinerja	16,00	15,68	98%

Tabel 3.6 Persandingan Nilai Realisasi Kinerja Indikator 2

02 Indikator Kinerja	Nilai Komponen pada Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR RI								
	2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
			15,66	15,68	100,13%	16,00	15,68	98%	

Tabel 3.7 Persandingan Nilai Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Indikator 2

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target (RPJM) 2024	Tingkat Kemajuan
03 Meningkatkan kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR RI	Nilai Komponen pada Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR RI	15,68	15,68	18,00	87,11%



Perhitungan indikator Nilai Komponen Pengukuran Kinerja, merupakan salah satu komponen penilaian AKIP. Komponen pengukuran kinerja mempunyai bobot nilai 25,00 pada tahun 2022, komponen pengukuran kinerja adalah sebesar 15,68. Apabila penilaian oleh KemenPAN-RB tidak diperoleh hingga penyusunan Laporan Kinerja, maka realisasi dan pencapaian nilai kerja diperoleh dari hasil penilaian tahun sebelumnya. Realisasi nilai pencapaian pada indikator kinerja 2 dapat dilihat pada Tabel 3.5

Berdasarkan Surat Menteri PAN-RB Nomor B/32/M.AA.05/2022 tanggal 7 Maret 2022 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, Nilai Pengukuran Kinerja sebesar 15,68. Nilai tersebut meningkat dibanding tahun 2020 yang mencapai 15,66.

Dengan memperhatikan realisasi Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada tahun 2021 sebesar 16,68, maka pada tahun 2022 Biro Organisasi dan Perencanaan menetapkan target lebih tinggi dibandingkan hasil capaian pada tahun 2021.

Indikator Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan selalu mengalami tren naik dari mulai dibentuknya Biro Organisasi dan Perencanaan pada tahun 2021. Persandingan Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Pada Tabel 3.7 dapat dilihat perbandingan realisasi Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dengan target jangka menengah tahun 2024 yang diamanatkan dalam Renstra Setjen. Tingkat kemajuan capaian pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan target jangka menengah sudah mencapai 87,11%

Nilai Pengukuran Kinerja pada Indeks Akuntabilitas Kinerja diberikan oleh KemenPAN-RB dan memiliki bobot terbesar kedua. Upaya yang dilakukan untuk dapat mencapai target RPJM, yaitu dengan mengembangkan aplikasi yang ada di lingkungan Biro Organisasi dan Perencanaan sebagai sarana informasi penyampaian kinerja di internal Setjen DPR RI agar manajemen dapat mengetahui

informasi kinerja secara *real time* sehingga dapat mengambil keputusan secara cepat dan akurat.

Dalam Periode 2020-2024, sampai dengan tahun 2021, Nilai Komponen Pengukuran Kinerja yang diperoleh oleh Biro Organisasi dan Perencanaan selalu mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat pada grafik 3.3 berikut:



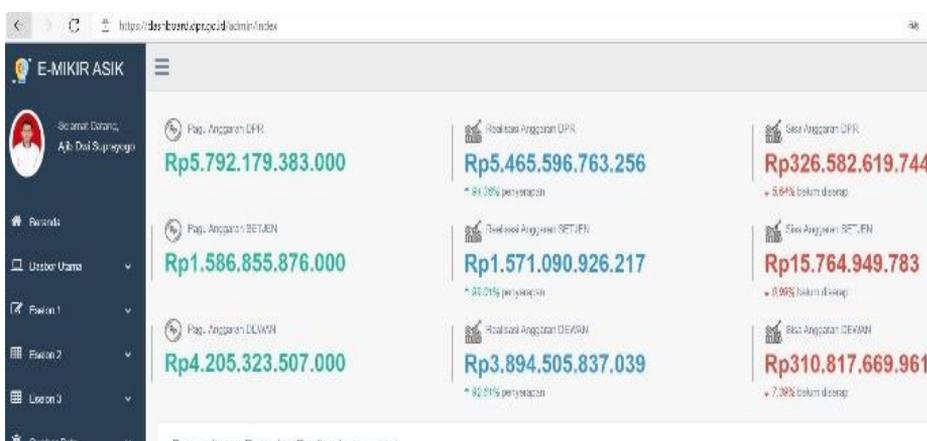
Grafik 3. 3 Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Tahun 2009-2021

Dalam upaya peningkatan capaian Nilai Pengukuran Komponen Kinerja, Biro Organisasi dan Perencanaan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang ada di lingkungan Biro Organisasi dan Perencanaan.

Bagian Perencanaan mempunyai beberapa layanan aplikasi yaitu aplikasi sistem informasi perencanaan program dan anggaran, aplikasi pelaksanaan anggaran serta aplikasi capaian output Setjen DPR RI. Aplikasi tersebut sangat bermanfaat dan mempunyai peran penting dalam laporan kinerja pelaksanaan anggaran, dan capaian output organisasi, dan untuk kedepannya aplikasi-aplikasi tersebut akan saling terintegrasi.

Setjen DPR RI sebagai *supporting system* kepada DPR RI dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya dan kualitas pelayanan kepada DPR, serta harus melaporkan kinerjanya setiap triwulan. Data yang akurat, tepat, dan cepat dapat menghasilkan keputusan yang baik.

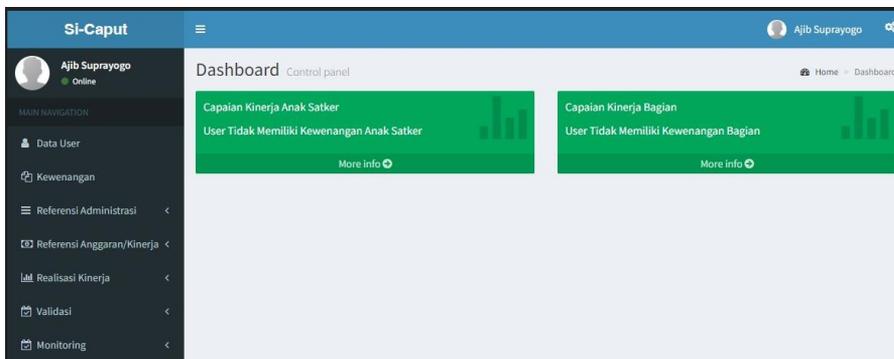
Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja yang sejalan dengan reformasi birokrasi untuk menghasilkan data tersebut telah dibangun aplikasi/dashboard Manajemen Informasi Kinerja Anggaran Terintegrasi Dengan Keluaran/Output (E-MIKIR ASIK) untuk membantu dalam pengambilan keputusan bagi pimpinan melalui monitoring dan evaluasi terhadap penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dan capaian output terintegrasi. Selain itu aplikasi/dashboard E-MIKIR ASIK dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan data dan informasi tentang kinerja pelaksanaan anggaran dan capaian output unit kerja.



Gambar 3.7 Screenshot Aplikasi E-MIKIR ASIK

Selain itu, dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan telah menyusun Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 1141/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang mengatur kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran di DPR RI. Di dalam pedoman tersebut telah menggunakan dashboard E-MIKIR ASIK sebagai *tools* nya. Melalui dashboard E-MIKIR ASIK tersebut dapat dilakukan reviu, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran unit kerja di Setjen DPR RI. Cara mengukur kinerja anggaran mengacu kepada indikator pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), maupun pada Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) dan E- Monev. Dalam rangka pengukuran kinerja tersebut, Biro Organisasi dan Perencanaan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Capaian Output (Si-Caput), sebagai *tools* dalam pengumpulan data capaian kinerja.

Pelaksanaan pengukuran kinerja ini dilakukan berdasarkan pada data yang disampaikan oleh unit kerja melalui aplikasi Si-Caput. Namun hingga saat ini, masih ada unit kerja yang masih belum paham terkait capaian *output* dari unit itu sendiri. Hal ini yang menyebabkan masih terdapat data yang kurang akurat. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Biro Organisasi dan Perencanaan melalui Bagian Perencanaan melakukan koordinasi secara berkala kepada unit kerja agar hasil pengukuran kinerja bisa menjadi lebih optimal. Untuk kedepannya akan dilakukan pendampingan dan bimbingan teknis berkala kepada unit kerja sehingga pengisian data dapat lebih akurat.



Gambar 3.8 *Screenshot* Aplikasi Si-Caput

Pelaksanaan pengukuran kinerja menggunakan sistem informasi, menyebabkan adanya efisiensi waktu dan sumber daya lainnya. Dengan ada penggunaan sistem tersebut, maka pengisian data dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Selanjutnya, untuk penyampaian data dapat dilakukan secara digital dan tidak perlu secara tertulis, dengan adanya persetujuan dari pejabat yang berwenang. Hal ini juga memberikan dampak positif karena memudahkan dalam memonitoring dan melaporkan hasil kinerja.

Indikator Kinerja 3



Tabel 3.8 Realisasi Nilai Perencanaan Kinerja Tahun 2022 Indikator 3

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
01 Meningkatkan kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR RI	Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR RI	10,50	9,95	94,76%

Tabel 3.9 Persandingan Nilai Realisasi Kinerja Indikator 3

02	Indikator Kinerja	Nilai Komponen pada Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR RI								
		2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
			9,93	9,95	100,20%	10,50	9,95	94,76%		

Tabel 3.10 Persandingan Nilai Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Indikator 3

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target (RPJM) 2024	Tingkat Kemajuan
03 Meningkatkan kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR RI	Nilai Komponen pada Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR RI	9,95	9,95	11,50	86,52%





Perhitungan indikator Nilai Komponen Pelaporan Kinerja, merupakan salah satu komponen AKIP. Komponen pelaporan kinerja mempunyai bobot nilai paling tinggi untuk penilaian AKIP dengan nilai 15, pada tahun 2022, target yang ditentukan untuk komponen pelaporan kinerja adalah sebesar 10,50. Apabila penilaian oleh KemenPAN-RB tidak diperoleh hingga penyusunan Laporan Kinerja, maka realisasi dan pencapaian nilai kerja diperoleh dari hasil penilaian tahun sebelumnya. Realisasi nilai pencapaian pada indikator kinerja 3 dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Berdasarkan surat Menteri PAN-RB Nomor B/32/M.AA.05/2022 tanggal 7 Maret 2022 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021, Nilai Komponen Pelaporan Kinerja sebesar 9,95. Nilai tersebut meningkat dibanding tahun 2020 yang mencapai 9,93.

Dengan memperhatikan realisasi Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada tahun 2021 sebesar 9,95, maka pada tahun 2022 Biro Organisasi dan Perencanaan menetapkan target lebih tinggi dibandingkan hasil capaian pada tahun 2021.

Sebagai pembanding, indikator Nilai Komponen Pelaporan Kinerja selalu mengalami tren naik dari mulai dibentuknya Biro Organisasi dan Perencanaan pada tahun 2021. Persandingan Nilai Komponen Pelaporan Kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Pada Tabel 3.10 dapat dilihat perbandingan realisasi Nilai Komponen Pelaporan Kinerja dengan target jangka menengah tahun 2024 yang diamanatkan dalam Renstra Setjen. Tingkat kemajuan capaian pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan target jangka menengah sudah mencapai 86,52%.

Dalam periode 2020-2024, sampai dengan tahun 2021, Nilai Komponen Pelaporan Kinerja yang diperoleh oleh Biro Organisasi dan Perencanaan selalu mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat pada grafik 3.4 berikut:



Grafik 3.4 Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Tahun 2009-2021

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN-RB terhadap nilai AKIP Setjen DPR RI Tahun 2021, terdapat rekomendasi terkait pelaporan kinerja dimana capaian kinerja pada Setjen DPR RI dan unit kerja masih belum dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan strategis pada periode berikutnya. Hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukan unit kerja yang memiliki target kinerja lebih rendah daripada perolehan tahun sebelumnya yang mengindikasikan bahwa komponen pelaporan kinerja masih rendah perolehannya dari segi pemanfaatan. Nilai tersebut akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian Nilai komponen Pelaporan Kinerja pada AKIP Setjen DPR RI karena memiliki bobot penilaian paling tinggi (50%) dari total penilaian (PermenPAN Nomor 88 Tahun 2021).

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan	Sub-Komponen 2 Kualitas	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan	
	20%	30%	50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Gambar 3.9

Penilaian Komponen AKIP berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan, berdasarkan hasil penilaian internal oleh Inspektorat Utama pada tahun 2022, masih terdapat beberapa catatan dalam penerapan Pelaporan Kinerja di Setjen DPR RI, yaitu:

1. Masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum menginformasikan terkait keberhasilan/kegagalan dalam mencapai target kinerja
2. Laporan Kinerja belum digunakan untuk penyusunan anggaran dan kinerja tahun berikutnya

Oleh karena itu, sepanjang tahun 2022, Biro Organisasi dan Perencanaan telah melakukan beberapa upaya untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi MenPAN-RB dan penilaian Inspektorat Utama dalam rangka meningkatkan Komponen Penilaian Kinerja Setjen DPR RI.

TINDAK LANJUT

REKOMENDASI KEMENPAN-RB DAN INSPEKTORAT UTAMA

01

Laporan Kinerja telah disusun setiap tahunnya baik di tingkat Sekretariat Jenderal DPR RI di tingkat Eselon I maupun Eselon II



02

Telah dilakukan reviu terhadap Laporan Kinerja Instansi oleh Inspektorat



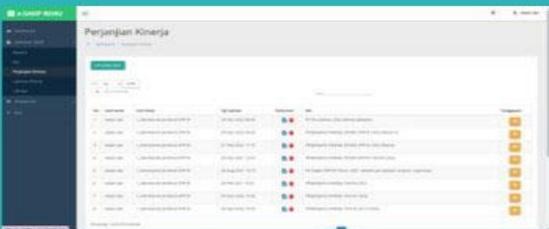
03

Laporan Kinerja Instansi telah dipublikasikan melalui website rb.dpr.go.id



04

Laporan Kinerja Instansi telah dilaporkan ke Menpan melalui website esr.menpan.go.id pada akhir Februari 2022



Gambar 3.10 Tindak Lanjut Rekomendasi KemenPAN-RB dan Inspektorat Utama

05

Penyusunan Laporan Kinerja sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 yang mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014



Telah terdapat penjelasan upaya perbaikan kinerja ke depan pada Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2021 yang akan digunakan menjadi dasar penentuan strategi kinerja di tahun yang akan datang

06



07

Telah dilakukan reviu terhadap target capaian kinerja tahun 2022 baik di tingkat Eselon I maupun Eselon II



Sosialisasi penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014.

08



Dari kegiatan reviu terhadap target capaian kinerja tahun 2022 baik di tingkat Eselon I maupun Eselon II, telah dilaksanakan penyesuaian target kinerja di dasarkan pada hasil laporan kinerja atau perolehan capaian tahun sebelumnya.



Gambar 3.11
Laporan Evaluasi Indikator dan Target Kinerja

NO	SASARAN/INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI			
	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3,22	3,24	100,62%
2	Tenwujudnya tata Kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas			
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	100%
2.	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%
3.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
4.	Hasil Penilaian Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%
5.	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
6.	Jumlah Unit Kerja yang mendapat predikat WBK	4	4	100%
7.	Jumlah Program Dilat yang memperoleh akreditasi minimal 'B'	1	3	300%
8.	Hasil Pengawasan Keangsan Lembaga DPR RI	BB	BB	100%
3	Tenwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			
a.	Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik	Menjuri Informatif	Informatif	125%
b.	Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik	Baik	100%

No. (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3,24
2.	Tenwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 3. Opini BPK atas Laporan Keuangan 4. Hasil penilaian maturitas SPIP 5. Hasil penilaian kapabilitas APIP 6. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK 7. Jumlah program dilat yang memperoleh akreditasi minimal 'B'	A
3.	Tenwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	1. Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik 2. Indeks pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Informatif Baik

Gambar. 3.12
Persandingan Target Kinerja Tahun 2022 dengan Laporan Kinerja Tahun 2021

Dalam Tabel terlihat bahwa Penyusunan target Kinerja Tahun 2022 Setjen DPR RI telah disesuaikan dengan hasil perolehan di

tahun 2021, sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan capaian kinerja di tahun-tahun yang akan datang. Pemanfaatan pelaporan kinerja diharapkan dapat menggambarkan kualitas pencapaian kinerja serta upaya perbaikan yang dapat mempengaruhi penentuan strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja tahun yang akan datang.

Hasil laporan kinerja tahun 2021 telah dimanfaatkan dengan adanya revisi Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan tahun 2022 yang didasarkan pada Hasil Evaluasi AKIP MenPAN-RB terhadap Setjen DPR RI.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No. (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR	1. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	21,50
		2. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	16,00
		3. Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	10,50
		4. Persentase realisasi anggaran Biro Organisasi dan Perencanaan	95%
2.	Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan RB Setjen DPR	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	7,65
		2. Nilai Kinerja Organisasi	4,73
Program		Anggaran	
Program Dukungan Manajemen		Rp.8.154.122.000,-	

Pjt. Deputi Bidang Administrasi,

Drs. Diaka Dwi Winarko, M.Si.
NIP. 19650705 199103 1 003

Jakarta, 21 Desember 2021
Kepala Biro Organisasi dan Perencanaan

Dr. Aulia Sofyan, S.Sos., M.Si.
NIP. 19721018 199203 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No. (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR	1. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	21,50
		2. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	16,00
		3. Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	10,50
		4. Persentase realisasi anggaran Biro Organisasi dan Perencanaan	95%
2.	Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan RB Setjen DPR	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	7,62
		2. Nilai Kinerja Organisasi	7,50
Program		Anggaran	
Program Dukungan Manajemen		Rp. 8.154.122.000,-	

Deputi Bidang Administrasi,

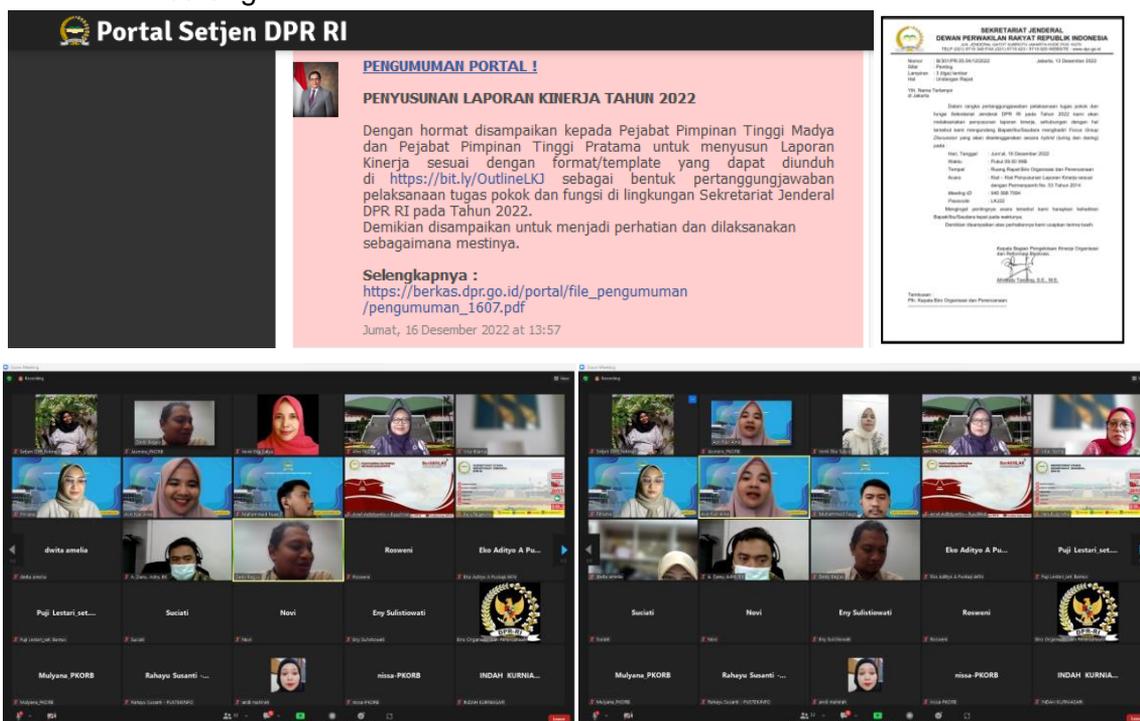
Ir. Sumardi Winoto, MPM.
NIP. 19650618 196811 1 001

Jakarta, Agustus 2022
Kepala Biro Organisasi dan Perencanaan

Dr. Aulia Sofyan, S.Sos., M.Si.
NIP. 19721018 199203 1 002

Gambar 3.13 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Melalui sosialisasi penyusunan LKj berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Biro Organisasi dan Perencanaan telah membuat format terkait penyusunan laporan kinerja yang dapat di adopsi oleh seluruh unit kerja di lingkup Eselon I dan II. Hal ini dimaksudkan agar terjadi keseragaman dalam penyampaian laporan serta mengakomodir semua informasi yang dibutuhkan untuk penyampaian kinerja yang dapat digunakan untuk menyusun strategi baik anggaran maupun pencapaian kinerja di tahun yang akan datang.



Gambar 3.14
Sosialisasi Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022

Dalam upaya peningkatan nilai komponen pelaporan kinerja, Biro Organisasi dan Perencanaan memanfaatkan teknologi informasi berupa website rb.dpr.go.id. Yang didalamnya berisikan informasi terkait data kinerja, capaian kinerja dan hasil evaluasi KemenPAN-RB terkait AKIP, dan hasil evaluasi internal AKIP oleh Inspektorat Utama. Informasi dimaksud digunakan sebagai basis data untuk menyusun laporan kinerja. Hal ini akan meningkatkan efisiensi waktu dalam memperoleh semua informasi yang diperlukan.

Indikator Kinerja 4



Tabel 3.11 Realisasi Nilai Perencanaan Kinerja Tahun 2022 Indikator 4

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
01 Meningkatkan kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR RI	Persentase realisasi anggaran Biro Organisasi dan Perencanaan	95%	99,92%	105,18%

Tabel 3.12 Persandingan Nilai Realisasi Anggaran per Bagian Indikator 4

No.	Unit Kerja	Realisasi 2021 (%)	Realisasi 2022 (%)	Kenaikan / Penurunan (%)
1.	Anggaran Biro	98,86	99,85	0,99
2.	Bagian Perencanaan	100,00	100,00	-
3.	Bagian PKORB	99,45	99,96	0,51
4.	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	98,18	99,69	1,51
	Total Biro	99,27	99,92	0,65

Tabel 3.13 Persandingan Nilai Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Indikator 4

Indikator Kinerja	Capaian		Persentase Capaian
	Realisasi	Target IKPA	
Persentase realisasi anggaran	99,92%	90,75%	110,18%





Pada tahun 2022, Biro Organisasi dan Perencanaan memiliki pagu anggaran sebesar **Rp10.591.138.000**. Realisasi anggaran Biro Organisasi dan Perencanaan di tahun 2022 sebesar **Rp10.582.177.435** atau **99,92%**. Realisasi anggaran ini berada di atas target yang telah ditetapkan yaitu sebesar **95%**. Realisasi anggaran Biro Organisasi dan Perencanaan juga berada di atas realisasi anggaran Satker Setjen yang mencapai 99,56%. Realisasi nilai pencapaian pada indikator kinerja 4 dapat dilihat pada Tabel 3.11 Sedangkan persandingan Nilai Realisasi Anggaran dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada Tabel 3.12

Dari Tabel 3.13 di atas penyerapan anggaran mendekati nilai maksimal dan mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan penyusunan rencana kerja yang optimal, Biro Organisasi dan Perencanaan juga melakukan optimalisasi anggaran untuk direalokasikan ke kegiatan prioritas yang belum tersedia anggarannya. Selain itu juga dilakukan pembahasan realisasi anggaran per triwulan dengan unit kerja yang bertujuan mengoptimalkan penyerapan anggaran di DPR RI secara keseluruhan.

Berdasarkan target penyerapan anggaran sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 90,75%. Dengan capaian realisasi anggaran Biro Organisasi dan Perencanaan sebesar 99,92% menunjukkan bahwa Biro Organisasi dan Perencanaan dapat mencapai target realisasi nasional berdasarkan IKPA.

Dalam rangka peningkatan capaian realisasi anggaran, Biro Organisasi dan Perencanaan berkoordinasi intensif sehingga anggaran yang tidak terserap optimal dapat direalokasi untuk kegiatan prioritas Biro Organisasi dan Perencanaan menggunakan mekanisme revisi anggaran.

Selain dalam realisasi anggaran, Biro Organisasi dan Perencanaan telah berhasil melakukan efisiensi sumber daya lainnya yang diwujudkan dengan adanya penyimpanan data realisasi anggaran tidak lagi berupa dokumen fisik, namun sudah beralih pada *cloud* internal DPR RI.



Indikator Kinerja 5



Tabel 3.14 Realisasi Nilai Perencanaan Kinerja Tahun 2022 Indikator 5

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
01 Meningkatkan kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan RB Setjen DPR RI	Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	7,62	7,54	98,95%

Tabel 3.15 Persandingan Nilai Realisasi Kinerja Indikator 5

02	Indikator Kinerja	Nilai Komponen pada Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR RI								
		2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
			7,52	7,54	100,27%	7,62	7,54	98,95%		

Tabel 3.16 Persandingan Nilai Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Indikator 5

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target (RPJM) 2024	Tingkat Kemajuan
03 Meningkatkan kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR RI	Nilai Komponen pada Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR RI	7,54	7,54	7,82	96,42%





Perhitungan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Keuangan, merupakan salah satu komponen penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh KemenPAN-RB, Komponen Nilai Akuntabilitas Kinerja Keuangan mempunyai bobot sebesar 10, pada tahun 2022, target yang ditentukan untuk komponen penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah 7,62. Apabila penilaian oleh KemenPAN-RB tidak diperoleh hingga penyusunan Laporan Kinerja, maka realisasi dan pencapaiannya diperoleh dari hasil penilaian tahun sebelumnya. Realisasi nilai pencapaian pada indikator kinerja 5 dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Berdasarkan Surat Menteri PAN-RB Nomor B/19/M.RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, Nilai Komponen Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan tahun 2021 mencapai 7,54. Indikator ini mengalami kenaikan sebesar 0,02 dibanding tahun 2020 yaitu 7,52. Dengan demikian, capaian kinerja pada indikator nilai akuntabilitas kinerja dan keuangan sebesar 98,95%.

Sebagai pembandingan, indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan selalu mengalami tren naik dari mulai dibentuknya Biro Organisasi dan Perencanaan pada tahun 2021. Persandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Pada Tabel 3.16 dapat dilihat perbandingan realisasi Nilai Komponen Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dengan target jangka menengah tahun 2024 yang diamanatkan dalam Renstra Setjen. Tingkat kemajuan capaian pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan target jangka menengah sudah mencapai 96,42%.

Nilai akuntabilitas kinerja dan keuangan diperoleh dari komponen penilaian opini BPK dan Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan. Berikut disampaikan rincian penilaian beberapa tahun terakhir:

Tabel 3.17 Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Uraian	Skala	2020	2021
a. Opini BPK	Opini	WTP	WTP
b. Nilai Akuntabilitas Kinerja	0-100	64,60	64,90

Berdasarkan penilaian tersebut opini BPK telah mencapai nilai maksimal yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Setjen DPR RI bahkan telah mendapatkan opini sejak tahun 2009 secara berturut-turut. Selanjutnya pada komponen nilai SAKIP Setjen DPR RI telah memperoleh nilai 64,90, nilai ini mengalami peningkatan sebesar 0,30 dari tahun sebelumnya yaitu 64,60.

Saat ini, Biro Organisasi dan Perencanaan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan guna meningkatkan nilai SAKIP. Optimalisasi sumber daya pada Biro organisasi dan Perencanaan telah dilaksanakan dengan memaksimalkan pemanfaatan penggunaan aplikasi keuangan internal maupun eksternal, yaitu:

1. Aplikasi SINCAN digunakan untuk mengefisienkan proses penyusunan program dan anggaran dengan memberikan kemudahan akses dan meminimalisir penggunaan kertas; dan
2. Aplikasi SAKTI yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan digunakan untuk pengambilan keputusan dalam hal pemantauan anggaran, capaian realisasi anggaran dan *output*.



Gambar 3.15
Upaya meningkatkan pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan



Indikator Kinerja 6



Tabel 3.18 Realisasi Nilai Perencanaan Kinerja Tahun 2022 Indikator 6

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
01 Meningkatkan kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan RB Setjen DPR RI	Nilai Kinerja Organisasi	7,50	7,41	98,8%

Tabel 3.19 Persandingan Nilai Realisasi Kinerja Indikator 6

02	Indikator Kinerja	Nilai Kinerja Organisasi							
		2020			2021			2022	
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
			4,63	7,41	160,04%	7,50	7,41	98,8%	

Tabel 3.20 Persandingan Nilai Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Indikator 6

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target (RPJM) 2024	Tingkat Kemajuan
03 Meningkatkan kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan RB Setjen DPR RI	Nilai Kinerja Organisasi	7,41	7,41	4,93	150,30%





INDIKATOR KINERJA 6

NILAI KINERJA ORGANISASI

Perhitungan indikator Nilai Kinerja Organisasi, merupakan salah satu komponen penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Komponen Nilai Kinerja Organisasi mempunyai bobot sebesar 10, pada tahun 2022, target yang ditentukan untuk komponen adalah sebesar 7.50. Apabila penilaian oleh KemenPAN-RB tidak diperoleh hingga penyusunan Laporan Kinerja, maka realisasi dan pencapaiannya diperoleh dari hasil penilaian tahun sebelumnya. Realisasi nilai pencapaian pada indikator kinerja 6 dapat dilihat pada Tabel 3.18.

Berdasarkan Surat Menteri PAN-RB Nomor B/19/M.RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, Nilai Komponen Kinerja Organisasi tahun 2021 mempunyai nilai 7,41. Indikator ini mengalami kenaikan sebesar 2,78 dibanding tahun 2020 yaitu 4,63. Dengan demikian, capaian kinerja pada indikator nilai akuntabilitas kinerja dan keuangan sebesar 160,04%.

Sebagai pembandingan, indikator Nilai Kinerja Organisasi selalu mengalami tren naik dari mulai dibentuknya Biro Organisasi dan Perencanaan pada tahun 2021. Persandingan Nilai Kinerja Organisasi dapat dilihat pada Tabel 3.19.

Pada Tabel 3.20 dapat dilihat perbandingan realisasi Nilai Kinerja Organisasi dengan target jangka menengah tahun 2024 yang diamanatkan dalam Renstra Setjen. Tingkat kemajuan capaian pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan target jangka menengah sudah mencapai 150,30%. Hal ini dikarenakan belum dilaksanakan perubahan Renstra Setjen DPR RI Tahun 2020-2024, oleh karenanya target yang digunakan masih sebesar 4,93. Sedangkan, pada tahun 2022 telah dilaksanakan perubahan Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan dengan memperhatikan hasil penilaian Reformasi Birokrasi pada Indikator Kinerja Nilai Kinerja Organisasi, dengan target yang ditetapkan sebesar 7,50.

Dalam mendukung pencapaian target nilai kinerja organisasi, Biro Organisasi dan Perencanaan, khususnya Bagian Organisasi dan Tata Laksana telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Penataan Organisasi

Sebagaimana telah disebutkan dalam Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan Tahun 2021, pada tahun ini penataan organisasi dilaksanakan untuk menyelaraskan dengan dinamika organisasi, salah satunya adalah penataan Pusat Penelitian yang harus dilaksanakan sebagai dampak pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pada tahun 2022, telah disampaikan usulan penataan organisasi Setjen DPR RI yang berdampak pada perubahan Peraturan Presiden dan Peraturan Sekretaris Jenderal yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Setjen DPR RI.

b. Evaluasi Kelembagaan

Pada tahun 2022, dilaksanakan kegiatan evaluasi kelembagaan yang dilaksanakan berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

c. Analisis Jabatan

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan analisis jabatan yang berdampak pada penambahan 8 jabatan baru, penghapusan 15 jabatan dan perubahan informasi 2 jabatan.

d. Analisis Beban Kerja

Pelaksanaan kegiatan analisis beban kerja dilaksanakan untuk menindaklanjuti perubahan struktur organisasi, perubahan dinamika kerja pada unit kerja, dan adanya kebijakan terkait penghitungan kebutuhan jabatan fungsional.

e. Evaluasi Jabatan

Kegiatan evaluasi jabatan didasari oleh perhitungan kebutuhan formasi jabatan fungsional. Pelaksanaan evaluasi jabatan yang dilakukan sudah melalui validasi dari KemenPAN-RB.

f. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

Pada tahun 2022, telah dilaksanakan penyusunan kamus dan standar kompetensi jabatan Setjen DPR RI dan penyusunan standar kompetensi Jabatan Fungsional yang dibina oleh Setjen DPR RI. Keseluruhan proses penyusunan kamus dan standar kompetensi dilaksanakan berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi ASN.

g. Pembentukan Jabatan Fungsional

- Pada tahun 2022, kegiatan pembentukan jabatan fungsional difokuskan pada penyusunan peraturan pelaksanaan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif.
- h. Monitoring Peta Proses Bisnis
Kegiatan monitoring peta proses bisnis pada tahun 2022 difokuskan pada identifikasi perubahan atau penyesuaian proses bisnis yang diakibatkan oleh penataan organisasi.
 - i. Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penyusunan SOP pada tahun 2022 difokuskan kepada 2 (dua) hal yaitu:
 - 1) Monitoring dan Evaluasi SOP
Pelaksanaan Monev SOP difokuskan pada menindaklanjuti catatan dari Tim Penilai Internal (Inspektorat Utama) terkait Proses Bisnis yang belum memiliki SOP.
 - 2) Penyusunan dan Penyesuaian SOP
Dalam penyusunan SOP di tahun 2022, dilaksanakan penyusunan SOP baru dan revisi SOP disesuaikan dengan perubahan aturan yang ada, baik terkait struktur organisasi maupun aturan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Berdasarkan hasil pembahasan di tahun 2022, terdapat 184 SOP yang berhasil disusun yang terdiri dari 150 SOP Baru dan 34 SOP AP revisi.
 - j. Standar Pelayanan
Penyusunan Standar Pelayanan (SP) pada tahun 2022, telah berhasil mengidentifikasi dan menyusun 8 Standar Pelayanan baru. Selain itu, kegiatan Monev Standar Pelayanan pada tahun 2022 juga sudah dilakukan penyesuaian dalam prosesnya dengan melakukan pelibatan antara penyelenggara layanan dan pengguna layanan melalui Forum Konsultasi Publik. Dari kegiatan tersebut juga sudah disusun Berita Acara yang berisikan janji dari Penyelenggara Layanan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas–standar pelayanan terkait dan tertuang dalam Laporan Forum Konsultasi Publik

Keberhasilan Biro Organisasi dan Perencanaan dalam mencapai target indikator kinerja nilai kinerja organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- a. Perencanaan kerja yang baik di awal tahun serta diikuti dengan kegiatan evaluasi secara periodik dalam memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;

- b. Adanya arahan yang jelas dalam melaksanakan pekerjaan;
- c. Proaktif dan antisipatif terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- d. Koordinasi yang intensif baik secara internal maupun dengan instansi terkait; dan
- e. Evaluasi berkala dan penentuan prioritas terkait ketersediaan anggaran.

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, Biro Organisasi dan Perencanaan menghadapi beberapa tantangan dan kendala yang mempengaruhi kinerja. Meski tidak semua kendala tersebut dapat dikendalikan, salah satunya adalah terkait proses penataan organisasi yang kewenangan persetujuannya berada di KemenPAN-RB. Sehingga hasil akhir penataan organisasi baru dapat ditindaklanjuti apabila telah mendapat surat persetujuan penataan organisasi dari KemenPAN-RB.

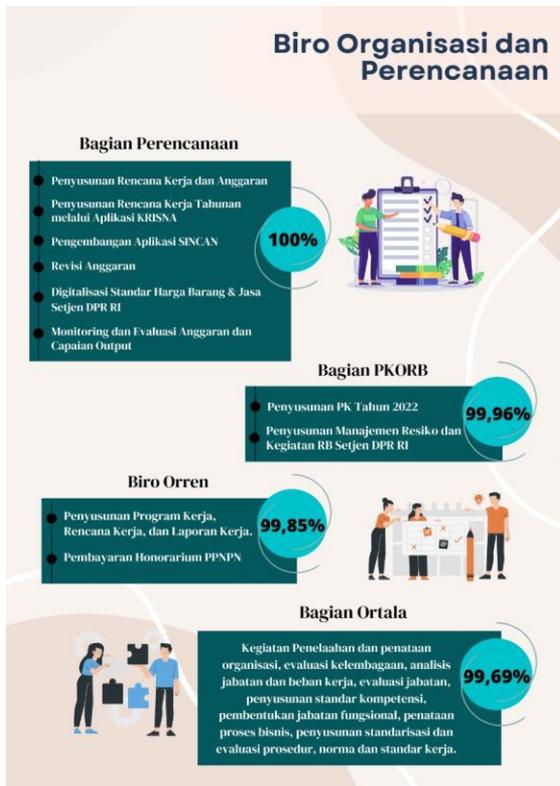


Gambar 3.16
Buku Terbitan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2022

3.2. Realisasi Anggaran

a. Realisasi Anggaran per Unit Kerja di Biro Organisasi dan Perencanaan

Pada tahun 2022, Biro Organisasi dan Perencanaan Realisasi mengelola anggaran sebesar Rp.8.154.122.000. Selanjutnya, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022, maka Biro Organisasi dan Perencanaan memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp. 2.437.016.000 sehingga pagu yang dikelola menjadi Rp.10.591.138.000.



Gambar 17 Realisasi Anggaran per Unit Kerja di Biro Organisasi dan Perencanaan

Realisasi anggaran Biro Organisasi dan Perencanaan sebesar **Rp10.582.177.435** atau **99,92%** dari total pagu sebesar **Rp10.591.138.000**. Realisasi anggaran ini berada di atas target yang telah ditetapkan yaitu sebesar **95%**. Realisasi anggaran Biro Organisasi dan Perencanaan juga berada di atas realisasi anggaran Satker Setjen yang mencapai 99,56%.

Realisasi anggaran tertinggi untuk unit kerja di bawah koordinasi Biro Organisasi dan Perencanaan dihasilkan oleh **Bagian Perencanaan** dengan realisasi **100%**. Kemudian, realisasi anggaran terbesar kedua dihasilkan oleh **Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi** dengan realisasi sebesar **99,96%**. Selanjutnya, realisasi anggaran terbesar ketiga dihasilkan oleh **Anggaran Biro Organisasi dan Perencanaan** yaitu sebesar **99,85%**. Selanjutnya, realisasi anggaran terbesar keempat dihasilkan oleh **Bagian Organisasi dan Tata Laksana** sebesar **99,69%**.

Biro Organisasi dan Perencanaan baru terbentuk pada tahun 2021, sehingga capaian realisasi anggaran Biro Organisasi dan Perencanaan hanya bisa disandingkan antara tahun 2021 dengan tahun 2022. Realisasi anggaran Biro Organisasi dan Perencanaan tahun 2022 mengalami **peningkatan** sebesar 0,65% jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2021.



Gambar 3.18 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Organisasi dan Perencanaan Tahun 2022

Peningkatan realisasi anggaran didukung dengan adanya peningkatan pelaksanaan kegiatan koordinasi antar unit kerja di jajaran Biro Organisasi dan Perencanaan, misalnya kegiatan Rapat Koordinasi Biro Organisasi dan Perencanaan Bulan Desember 2022 di Kopo, Jawa Barat.

b. Realisasi Anggaran per Sasaran Program

Anggaran di Biro Organisasi dan Perencanaan sepanjang tahun 2022 sebagian besar dialokasikan untuk memenuhi sasaran “Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR RI” dengan porsi sebesar 72,31%. Besarnya alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran “Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR RI” menggambarkan bahwa peran Biro Organisasi dan Perencanaan sangat strategis dalam pembentukan kesetjanaan yang akunTabel. Dari komponen penilaian akuntabilitas kinerja, kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Perencanaan memiliki peran secara langsung dalam pencapaian nilai sebesar 70 dari total nilai 100.

Adapun sisanya sebesar 27,69% untuk memenuhi sasaran “Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan RB Setjen DPR RI”. Dari komponen penilaian RB, kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Perencanaan memiliki peran secara langsung dalam pencapaian nilai sebesar 20 dari total nilai 100.

Tabel 3.21. Sasaran, Indikator Pagu dan Realisasi Biro Organisasi dan Perencanaan Tahun 2022

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR RI	Nilai Komponen pada Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR RI	8.516.055.000	8.507.827.035	99,90
	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen			
	Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR RI			
	Persentase realisasi anggaran Biro Organisasi dan Perencanaan			
Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan RB Setjen DPR RI	Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	2.075.083.000	2.074.350.400	99,96
	Nilai Kinerja Organisasi			

2 0 2 2

BAB IV



PENUTUP

LKJ
BIRO
OREN

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Biro Organisasi dan Perencanaan selalu berupaya melaksanakan kinerja secara optimal dan terus melakukan upaya perbaikan. Biro Organisasi dan Perencanaan dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan negara yang fleksibel namun tetap memperhatikan aspek akuntabilitas, selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan mitra kerja baik internal yaitu seluruh unit kerja dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, maupun eksternal seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, BPK, BPKP dan Ditjen Pajak, serta mitra kerja lainnya.

Dengan sumber daya manusia yang dimiliki dan komitmen yang kuat dari pimpinan dan pegawai di lingkungan Biro Organisasi dan Perencanaan untuk bekerja sebaik mungkin, pada tahun 2022 Biro Organisasi dan Perencanaan telah mampu menyelesaikan seluruh target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Tahun 2022. Biro Organisasi dan Perencanaan mampu meningkatkan kualitas kinerja program dan pelaksanaan anggaran.

Capaian kinerja Biro Organisasi Dan Perencanaan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Capaian Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan Tahun 2022

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR RI	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	21,50	20,45*	95,12%
	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas	16,00	15,68*	98%

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Kinerja Setjen DPR			
	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	10,50	9,95*	94,76%
	Persentase Realisasi Anggaran Biro Organisasi dan Perencanaan	95%	99%	104%
Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI	Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	7,62	7,54*	98,95%
	Nilai Kinerja Organisasi	7,50	7,41*	98,8%

Dari 6 indikator sebagaimana digambarkan di atas terdapat satu indikator yang melebihi target dan lima indikator yang tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan data realisasi menggunakan hasil penilaian tahun 2021.

4.2. REKOMENDASI

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan Biro Organisasi Dan Perencanaan pada tahun 2023 adalah:

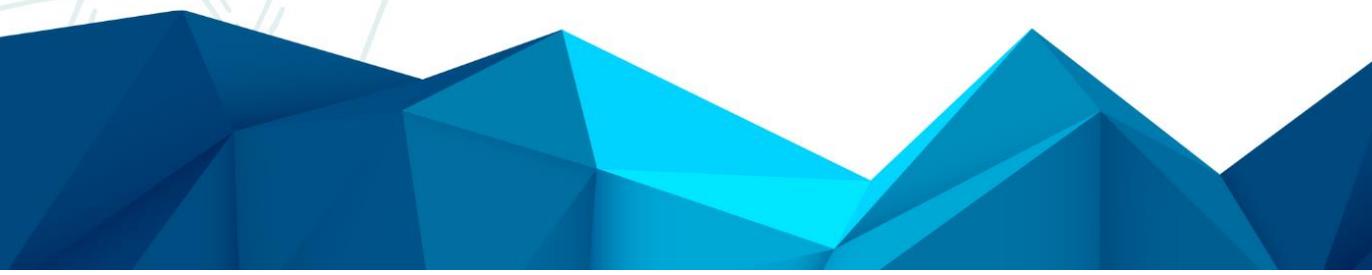
- a. Keikutsertaan dalam pembangunan Zona Integritas;
- b. Pembangunan e-SAKIP;
- c. Pengembangan aplikasi e-MIKIR ASIK dan Si-REVI yang dapat meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran;
- d. Mengidentifikasi dampak penataan organisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI;

- e. Penyesuaian Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja di Biro Organisasi dan Perencanaan, agar lebih dapat menggambarkan kinerja organisasi.

2 0 2 2

LAMPIRAN

UKJIBIBO OREN



Lampiran 1- Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2022


**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATKER SETJEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Aulia Sofyan, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala Biro Organisasi dan Perencanaan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Sumariyandono, MPM.
Jabatan : Deputy Bidang Administrasi

selsku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2022

Pihak Kedua, Pihak Pertama,


Ir. Sumariyandono, MPM. 
NIP. 19650618 198811 1 001 Dr. Aulia Sofyan, S.Sos., M.Si
NIP. 19721018 198203 1 002

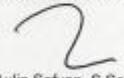
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR	1. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR 2. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR 3. Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR 4. Persentase realisasi anggaran Biro Organisasi dan Perencanaan	21,50 16,00 10,50 95%
2.	Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan RB Setjen DPR	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 2. Nilai Kinerja Organisasi	7,62 7,50
Program		Anggaran	
Program Dukungan Manajemen		Rp. 8.154.122.000,-	

Deputi Bidang Administrasi.


Ir. Sumaryandono, MPM
 NIP. 19650818 199811 1 001

Jakarta, Agustus 2022
Kepala Biro Organisasi dan Perencanaan


Dr. Aulia Sofyan, S.Sos., M.Si
 NIP. 19721018 199203 1 002